

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam hubungan internasional, kondisi geopolitik seringkali digunakan oleh aktor-aktor negara untuk menjelaskan masalah mengenai situasi politik internasional. Suatu wilayah yang strategis dapat menjadi pusat perhatian bagi banyak negara dalam rangka pemenuhan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut. Adanya kepentingan suatu negara pada sebuah kawasan akan menimbulkan dinamika geopolitik yang dapat berpengaruh terhadap negara-negara yang berada di wilayah kawasan tersebut. Kepentingan itu dapat berupa kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan juga kepentingan keamanan.

Saat ini, kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu kawasan yang mendapat perhatian besar dari banyak negara di kancah internasional, terlebih pada aspek ekonomi dan keamanan. Hal ini membuat banyak kepentingan yang saling berbenturan sehingga menciptakan sebuah dinamika politik. Dengan keadaan ini tidak sedikit negara yang memanfaatkannya sebagai kepentingan luar negeri guna meraih keuntungan terhadap dinamika politik yang sedang terjadi (Tertia, 2018).

Asia Pasifik merupakan kawasan yang menjadi pusat perhatian bagi banyak negara terutama bagi negara-negara besar dunia yang memiliki pengaruh dan posisi yang kuat dalam politik luar negerinya seperti, Korea Selatan, Rusia, Amerika Serikat, Jepang serta negara dengan kekuatan ekonomi baru Cina. Kawasan Asia Pasifik telah didominasi oleh negara-negara besar tersebut yang saling berlomba-lomba dalam menetapkan kebijakan luar negerinya yang berfokus terhadap isu-isu di kawasan. Dengan kata lain, pergejolakan politik dalam kawasan ini akan bergerak secara dinamis sehingga

mempengaruhi kondisi keamanan dan perdamaian di kawasan. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakstabilan akibat dari banyaknya kepentingan yang saling berbenturan (Rachmat, 2017).

Bersama dengan itu, Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting terhadap perkembangan geopolitik yang ada di kawasan Asia Pasifik. Melalui keberhasilan Jepang dalam pertumbuhan ekonomi, Jepang telah mampu menunjukkan posisinya terhadap negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dibuktikan ketika pasca perang dunia ke II berakhir, Jepang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu menyebarkan pengaruhnya ke berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Dalam perkembangannya Jepang juga berhasil mengubah struktur dan memperbaiki pemerintahannya sehingga menjadi negara yang tumbuh dengan kemampuan ekonomi yang sangat maju dan mampu menyaingi kemampuan ekonomi di negara-negara barat. Keberhasilan Jepang di dunia internasional banyak memberikan dampak positif terhadap perkembangan kawasan di Asia Pasifik. Hal ini membuat Jepang digelar julukan sebagai “negara dengan kekuatan ekonomi Asia”. Negara ini tidak hanya unggul dalam aspek ekonomi tetapi juga berkontribusi dalam aspek-aspek lain seperti, perkembangan teknologi, strategi militer, pendidikan, maupun budaya. Hal demikianlah yang membuat Jepang dikenal sebagai negara yang sangat berpengaruh di dunia. Melalui keberhasilan pada aspek-aspek ini pula Jepang dipandang mampu untuk menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan Asia Pasifik (Santoso, 2016).

Seiring dengan keberhasilan Jepang dalam menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik, memasuki tahun 2013 kerja sama Jepang yang telah terjalin lama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik kemudian secara bertahap mengalami penurunan dan Jepang tidak lagi menjadi negara yang diprioritaskan oleh negara-negara tersebut. Penurunan ini

meliputi aspek kerja sama di bidang ekonomi, infrastruktur, dan militer. Hal lainnya yaitu, adanya ancaman terhadap politik-keamanan, dan ekonomi bagi Jepang di kawasan Asia Pasifik.

Pada bidang politik-keamanan misalnya, adanya peningkatan kekuatan dan aktifitas militer suatu negara di wilayah yang berdekatan dengan Jepang. Ditambah lagi dengan munculnya tindakan-tindakan agresif suatu negara di kawasan Asia Pasifik mengenai klaim kedaulatan serta penerjunan pasukan militer untuk berpatroli di wilayah yang bersengketa. Ini menimbulkan kecemasan terhadap keamanan Jepang dan berdampak terhadap ketegangan hubungan diplomatik dengan negara yang berkonflik yang mana berimplikasi terhadap perekonomian Jepang (Cordesman A. H., 2014).

Sedangkan pada bidang ekonomi, Ekonomi Jepang pada tahun 2018 mengalami penurunan terburuk selama 4 tahun di mana pada kuartal III tahun 2018 tingkat pertumbuhannya hanya 2,5% dan mengalami penurunan pada kuartal IV yakni 1,2% (Voa Indonesia, 2018). Kemudian semakin diperparah pada kuartal II tahun 2019 tingkat pertumbuhannya hanya mencapai 0,4%, semakin menurun pada kuartal III tahun 2019 yang hanya tumbuh 0,1%, dan pada kuartal IV tahun 2019 minus 6.3% ini merupakan penurunan yang terendah sejak tahun 2014. Adanya penurunan ekonomi Jepang yang dihitung sejak beberapa tahun terakhir ini, dipandang merupakan implikasi dari adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang mengakibatkan ekspor Jepang mengalami penurunan (Oktarianisa, 2019).

Jepang sebagai negara kekuatan ekonomi terbesar ketiga di Asia Pasifik mengeluarkan strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) (Pollock, 2019), ditunjukkan melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Shinzo Abe, antara lain; Pertama, memindahkan stasiun udara korps marinir Amerika Serikat di Futenma ke Teluk Henoko di Nago Prefektur Okinawa, salah satu pulau yang berada di dekat Laut China Timur. Kedua, terlibat dalam kesepakatan bersama Kemitraan

Trilateral Jepang, Australia, dan Amerika Serikat (Tomoo Kikuchi, 2019). Ketiga, kemitraan Jepang di Asia Tenggara. Keempat, pada Desember 2018 kabinet Jepang menetapkan *National Defense Program Guidelines* (NDPG) revisi yang ke-4 (JMSDF, n.d.).

Fokus kebijakan yang dikeluarkan oleh Shinzo Abe melalui strategi FOIP ini sangat berbeda dengan fokus kebijakan perdana menteri Jepang yang pernah menjabat pada periode sebelumnya. Pada masa kepemimpinannya, Abe mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai prioritas utamanya, yang mana upaya tersebut belum pernah dilakukan sebesar itu oleh para perdana menteri Jepang sebelum-sebelumnya (Cabinet Public Relations Office, 2012).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu:

***“Mengapa Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe menerapkan strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) di kawasan Asia-Pasifik?”***

## **C. LANDASAN TEORITIK**

Dalam mencari jawaban terhadap rumusan masalah menggunakan pertanyaan mengapa, maka penulis akan menggunakan teori neorealisme dengan detil pemikiran Kenneth Waltz pada konsep *balance of power* dan konsep *sphere of influence* yang digunakan sebagai alat bantu untuk melihat Motif Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe menerapkan strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) di kawasan Asia-Pasifik.

## 1. Konsep *Balance of Power*

Neorealisme menerangkan bahwa adanya kekuatan luar yang mengancam suatu negara di bentuk oleh *balance of power* atau penyeimbangan kekuatan. Kenneth Waltz menjelaskan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu: susunan politik internasional yang anarki serta pemenuhan unit-unit yang ingin bertahan hidup (Waltz, 1979).

*Balance of power* merupakan sebuah konsep yang menjelaskan tentang penyeimbangan kekuatan dalam struktur internasional. Menurut Glenn Snyder *balance of power* adalah inti dari hubungan internasional (Snyder, 1961). Sedangkan para sejarawan memberikan kebenaran bahwa *balance of power* adalah suatu konsep yang telah lama digunakan oleh banyak negara di dunia dalam kurun waktu yang panjang. Kebanyakan sumber diambil dari Yunani kuno dan Cina kuno, bahkan pada era Renaissance hingga abad ke 19 (Levy, 2004). Ditambah lagi dengan pendapat dari Henry Kissinger yang menyatakan *balance of power* adalah seni yang diterapkan oleh pemimpin negara (Kissinger, 1973).

Konsep *balance of power* melihat bahwa perang dan persaingan menjadi suatu tantangan dalam sistem yang anarki karena negara selalu mencari *power* untuk bertahan dari ancaman negara-negara lain, sehingga muncul persaingan kekuatan dari setiap negara untuk bertahan dari ancaman tersebut. Persaingan ini menunjukkan adanya ketidakadilan akibat perbedaan *power* dari masing-masing negara. Negara yang maju dengan perekonomian yang baik tentu memiliki *power* yang lebih besar, dan suatu negara dengan meningkatkan aset militer dapat dengan mudah melakukan penyeimbangan kekuatan. Namun, bagaimana dengan negara-negara kecil yang tidak memiliki *power* yang besar? Negara kecil tentu akan lebih mudah dikuasai dan dipengaruhi oleh negara-negara besar dan kemudian di kontrol sedemikian rupa sehingga menjadi sangat ketergantungan.

Hal ini jelas menunjukkan ketidakimbangan dari *power* yang dimiliki oleh setiap negara tersebut. Dalam melihat perbedaan *power*, Morgenthau menjelaskan bahwa sumber utama *power* diukur dari geografi, politik, ekonomi, dan sosial-kultural termasuk kualitas penduduk, pemerintahan, diplomasi, dan militer (Paul, 2004). Secara umum, *power* suatu negara dibuktikan berdasarkan kekuatan militer, politik dan ekonomi negara tersebut, ketiga bidang tersebutlah yang sering diproyeksikan sebagai sebuah kekuatan oleh suatu negara dalam sebuah sistem internasional.

Konsep *Balance of Power* menilai bahwa melalui kekuatan fisik suatu negara dapat dinilai apakah memiliki *power* yang besar atau tidak untuk dijadikan sebagai sebuah ancaman. Konsep ini menunjukkan bahwa Jepang sebagai suatu negara yang maju dan berpengaruh di kawasan Asia Pasifik melihat terdapat suatu negara yang menjadi ancaman bagi Jepang akibat kemunculannya yang diiringi dengan pertumbuhan yang sangat pesat seperti pada aspek ekonomi, militer, maupun sosial-budaya. Hal ini bila dibiarkan dapat berdampak terhadap kepentingan-kepentingan Jepang pada aspek-aspek tersebut yang telah terjalin lama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kenneth Waltz menyatakan bahwa sistem bipolar – seperti pada perang dingin, merupakan sistem yang lebih baik dan stabil serta mampu menjanjikan perdamaian dan keamanan dibandingkan sistem multipolar yang kemungkinannya tidak begitu tinggi (Waltz, 1979).

Jepang sebagai salah satu aktor penting di kawasan Asia Pasifik menginginkan sebuah perubahan dari adanya kemunculan kekuatan baru suatu negara yang menyentuh banyak aspek dalam sistem internasional di kawasan. Jepang melihat hal ini jika tidak diimbangi dengan kekuatan yang sama, dapat menimbulkan ketidakstabilan yang semakin tinggi dan mengancam kepentingan-kepentingan Jepang yang telah terjalin lama dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Melalui strategi *Free and Open Indo Pacific* diproyeksikan mampu menunjukkan reaksi Jepang terhadap kemunculan

kekuatan baru negara tersebut di wilayah Asia Pasifik yang semakin mendominasi di kawasan.

## 2. Konsep *Sphere of Influence*

Penyebaran pengaruh atau yang biasa dikenal dengan *Sphere of influence*, di dalam politik internasional merupakan klaim suatu negara atas kontrol eksklusif pada suatu wilayah atau daerah tertentu, yang mana hal ini belum tentu dapat diakui atau tidak oleh negara lainnya. Sehingga dengan kata lain, suatu negara dapat dikatakan melakukan hegemoni dalam *sphere of influence* yang dimilikinya. Konsep ini pertama kali digunakan di Jerman pada akhir abad ke-19 di mana perjanjian mengenai *sphere of influence* dilakukan antara Britania Raya dan Jerman untuk memenuhi kesepakatan damai yang mengatur tentang pembatasan pengaruh wilayah yang ditempati bagi ke dua negara tersebut (Deudney, 2019).

*Sphere of Influence* memiliki batasan-batasan pengaruh kekuasaan, apabila terdapat suatu negara yang ingin mengintervensi *Sphere of Influence* dari suatu negara lain maka hal itu akan menimbulkan konflik diantara keduanya. Di dalam persaingan Jepang di Kawasan Asia Pasifik menjadi ruang konflik yang kompleks akibat adanya perebutan hegemoni di kawasan tersebut. Hal ini tentu akan berdampak kepada negara-negara di dalamnya yang sebenarnya tidak menginginkan adanya konflik tersebut.

Konflik adalah perselisihan antara dua negara atau kelompok yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan. Dalam hal ini konflik terjadi akibat adanya gesekan antar *sphere of influence* yang saling memiliki kepentingan untuk memperebutkan kekuasaan pada suatu wilayah. Menurut penjelasan Holsti, gesekan *sphere of influence* diasumsikan sebagai suatu konflik hak istimewa yang keberadaannya dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri pada suatu wilayah, meskipun bukan bagian dari kedaulatannya. Konflik hak istimewa ini menjelaskan bahwa

terdapat konflik yang disebabkan oleh dua negara yang mungkin jaraknya saling terpisah jauh ribuan kilometer (Holsti, 1992).

Pembahasan penyebaran pengaruh kekuasaan di kawasan Asia Pasifik ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah tentang Mengapa Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe menerapkan strategi *Free and Open Indo-Pacific* di kawasan Asia-Pasifik.

#### **D. HIPOTESA**

Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka asumsi dasar peneliti dalam menjelaskan motif Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe menerapkan strategi *Free and Open Indo-Pacific* di kawasan Asia-Pasifik ditujukan untuk:

1. Mengimbangi perluasan kekuatan Cina.
2. Penguatan kepemimpinan Jepang di kawasan Asia Pasifik.

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang didukung dengan bukti dan fakta. Dengan lebih menekankan pada motif Jepang dibawah kepemimpinan Shinzo Abe dalam menerapkan strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pesan positif serta berguna sebagai manivestasi dari penerapan teori yang diperoleh Penulis selama kuliah.

#### **F. METODOLOGI PENELITIAN**

1. Metodologi Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh Penulis untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan kajian literasi seperti media pustaka, majalah, surat kabar, jurnal dan sumber-



sumber data lainnya. Sedangkan untuk mendapatkan data yang *up to date*, akan banyak didukung melalui persediaan data yang ada di internet maupun sumber lain yang diyakini masih mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang dikaji.

## 2. Metode Analisa

Skripsi ini akan menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat eksplanatif dan analitis. Metode analisa ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dari permasalahan yang diteliti untuk kemudian dianalisis mengapa masalah tersebut dapat terjadi.

## **G. JANGKAUAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki fokus pada Mengapa Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe menerapkan strategi *Free and Open Indo-Pacific* di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini didasari akan terhitungnya Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang menginisiasi strategi FOIP sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik dan aplikasi teori, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, bab ini akan menjabarkan lebih dalam tentang dinamika kebijakan luar negeri Jepang di kawasan Asia Pasifik era sebelum Perdana Menteri Shinzo Abe.

Bab III, bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan Jepang dibawah kepemimpinan Shinzo Abe dalam strategi *Free and Open Indo Pacific* (FOIP) di kawasan Asia Pasifik.

Bab IV, bab ini akan memaparkan motif Jepang dalam strategi *Free and Open Indo Pacific* (FOIP) di kawasan Asia-Pasifik.

Bab V, bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang berisikan rangkuman dari bab-bab sebelumnya.